

PRIORITAS LAINNYA	BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme										
a.	Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	Terlaksananya tugas OMSP secara efektif	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP	30%	29%	30%	31%	32%	1.485.02	MABES TNI
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen	Terseleenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen	Jumlah anggaran yang tersedia	30%	30%	30%	31%	32%	1.055.29	BADAN INTELIJEN NEGARA
c.	Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat	Meningkatny jumlah forum kemitraan Polisi dan msyarakat	Jumlah Forum Kemitraan Polmas	41.000	45.100	49.600	54.560	60.000	824.47	POLRI
d.	Penindakan Tindak Pidana Terorisme	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Terorisme	Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Terorisme tk Nasional	100%	100%	102%	102%	103%	59.67	POLRI
e.	Kegiatan Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme	Terseleenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme	Jumlah Rakor Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	3,959	Kemenko Polhukam
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		
			Jumlah Rakor Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali		
Pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme										
a	Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui Sosialisasi yang Berkelanjutan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan & fasilitasi pengembangan nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan	NA	1 Modul	1 Modu	1 Modul	1 Modul	7,80	Kemendagri
			Jumlah sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan,	NA	15 kali	20 kali	25 kali	25 kali	30,00	

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			aparatur pemerintah							
b	Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Rakor Wawasan Kebangsaan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	3,431	Kemenko Polhukam
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		
c	Ops Gaktib dan Ops Yustisi.	Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan.	Prosentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib.	45%	44%	45%	46%	47%	95.60	MABES TNI
d	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan	Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional	45%	44%	45%	46%	47%	54.68	MABES TNI
e	Operasi intelijen Strategis	Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.	Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan	45%	44%	45%	46%	47%	267.57	MABES TNI
f	Operasi Militer Selain Perang (OMSP).	Terlaksananya tugas OMSP secara efektif	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP	30%	29%	30%	31%	32%	1,485.02	MABES TNI
g	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat	Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat	% Peningkatan Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efisiensi Deteksi Dini	40%	40%	41%	43%	45%	731.85	TNI AD
h	Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri	Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri	Rasio personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota	30%	30%	30%	32%	33%	1,362.56	BADAN INTELIJEN NEGARA
Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia										
a	Peran Indonesia dalam Reformasi PBB dan Dewan Keamanan PBB dan kontribusi Indonesia dalam Menjaga Perdamaian Dunia	Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam setiap forum PBB dan DK PBB	Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB.	4 kali prakarsa	4 kali prakarsa	4 kali prakarsa	4 kali prakarsa	4 kali prakarsa	20,64	Kemenlu
		Meningkatnya kerjasama multilateral untuk menjaga perdamaian dunia dalam isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata	Jumlah koordinasi teknis	19 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali		
			Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional	10 posisi	10 posisi	10 posisi	10 posisi	10 posisi		
			Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
		konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme	internasional yang dihadiri							
			Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerja sama	-----	2 kali	1 kali	-----	-----		
Peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri										
a	Perluasan, Pengembangan dan penguatan sistem pelayanan warga (<i>citizen service</i>)	Terlaksananya penguatan sistem pelayanan warga (<i>citizen service</i>)	Jumlah citizen services yang diperkuat	24	24	24	24	24	139,405	Kemenlu
b	Pertemuan dan perundingan dengan negara sahabat	Terlaksananya pertemuan dan perundingan dengan negara sahabat terkait dengan perlindungan WNI/BHI	Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali	8,45	Kemenlu
c	Penanganan Kasus TKI di luar negeri	Tertanganinya kasus TKI di luar negeri	Tersedianya database mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri	Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	Database WNI/BHI di seluruh perwakilan	1,69	Kemenlu
			Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan	-	14.998	8.498	4.998	1.998	970,17	
			Jumlah WNI/TKI yang direpatiasi	-	6.500	3.500	3.000	1.998	58,23	
			Jumlah WNI/TKI yang dideportasi	-	9.608	4.804	4.804	4.804	58,23	
			Prosentase pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita	-	29,17%	41,20%	60,10%	100%	10,16	
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI	-	100%	100%	100%	100%	3,2	
d	Sosialisasi dan Koordinasi Teknis	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi teknis pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	1,69	Kemenlu
			Jumlah koordinasi dengan instansi terkait	65 kali	70 kali	80 kali	85 kali	90 kali	1,69	

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			baik di dalam maupun di luar negeri							
			Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik	15 kota	20 kota	25 kota	30 kota	35 kota	1,69	
			Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri	6 kali	10 kali	15 kali	20 kali	25 kali	1,69	
Penguatan dan pematapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi										
a	Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan	145 pkr	145 pkr	145 pkr	145 pkr	145 pkr	53.33	Kejagung
b	Peningkatan Penuntutan Tipikor	Meningkatnya penyelesaian perkara tipikor secara cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan	145 pkr	100 pkr	100 pkr	100 pkr	100 pkr	18.96	Kejagung
c	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejati, Kejari dan Cabjari	Meningkatnya penyelesaian perkara tipikor secara cepat, tepat & akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah	Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari	1.700 pkr	1.400 pkr	1.400 pkr	1.400 pkr	1.400 pkr	736.8	Kejagung
Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor										
a	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang politik, hukum & keamanan • Bidang keuangan dan perbankan • Bidang industri dan perdagangan • Bidang kesejahteraan rakyat • Bidang pertanahan, tata ruang, dan LH • Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor 	20%	40%	60%	80%	100%	75,0	Kemenkumham

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi 							
Pengembalian aset (<i>asset recovery</i>)										
a	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis	<ul style="list-style-type: none"> Bidang politik, hukum & keamanan Bidang keuangan dan perbankan Bidang industri dan perdagangan Bidang kesejahteraan rakyat Bidang pertanahan, tata ruang, dan LH Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor Peraturan perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi 	20%	40%	60%	80%	100%	38.5	Kemenkumham
b	Kegiatan Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan	Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> Jmlh SDM mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan manajemen & Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja Jmlh pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll Jmlh kurikulum, silabus, materi ajar yg dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan Jmlh pengembangan sistem diklat yang 	3.826 org	6.450 org	7.860 org	7.880 org	8.290 org	203.5	MA-RI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			terhubung dengan sistem rekrutmen, sistem pengawasan dan sistem karir bagi hakim dan aparatur peradilan							
c	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum	Meningkatnya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan & penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan & pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.	Jumlah kegiatan kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri.	7 keg	8 Keg	10 keg	10 keg	10 keg	8,57	Kejaksanaan Agung
Peningkatan kepastian hukum										
a	Kegiatan Percepatan peningkatan penyelesaian perkara	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yg menarik perhatian masyarakat (KKN, HAM) Jumlah penyelesaian minutas perkara yg tepat waktu. Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien Tersedianya biaya penyelesaian perkara yang memadai 	10.000 pkr	10.200 pkr	10.300 pkr	10.400 Pkr	10.500 pkr	146,9	MA-RI
b	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> Jmlh penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum Jmlh penyelesaian perkara yg kurang 	145.000 pkr	147.900 pkr	149.380 pkr	150.870 pkr	153.100 pkr	320.2	MA-RI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			dari 6 bulan • Jmlh penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu • Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum							
c	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	• Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Agama • Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan • Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan kesyahriaan yang lengkap dan tepat waktu • Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum	80.000 pkr	81.600 pkr	82.400 pkr	83.200 pkr	84.400 pkr	102.8	MA-RI
d	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara	• Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama & Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer dan TUN • Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan • Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan	5.000 pkr	5.100 pkr	5.151 pkr	5.200 pkr	5.280 pkr	26	MA-RI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR) Total	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014		
			tepat waktu • Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum							
Penguatan perlindungan HAM										
a	Kegiatan Kerjasama HAM	Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan Perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik (NA) instrmnt HAM internasional	Persentase harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM	100%	100%	100%	100%	100%	9.0	Kemenkumham
			Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrmnt HAM Internasional	6 instrmnt. HAM Internasional dan 2 N.A	6 instrmnt HAM Internasional dan 2 N.A	6 instrmnt HAM Internasional dan 2 N.A	6 instrmnt HAM Internasional dan 2 N.A	6 instrmnt HAM Internasional dan 2 N.A		
			Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM	10 Negara/ NGO;	10 Negara/ NGO;	10 Negara/ NGO;	10 Negara/ NGO;	10 Negara/ NGO;		
			Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementasi HAM/RANHAM	440 pusat dan daerah	440 pusat dan daerah	440 pusat dan daerah	440 pusat dan daerah	440 pusat dan daerah		
b	Kegiatan Penguatan HAM	Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/ klayon telah mengikuti pelatihan HAM	Jumlah program pembelajaran HAM	10	10	10	10	10	10.0	Kemenkumham
			Jumlah bahan ajar HAM	10	10	10	10	10		
			Jumlah fasilitator pelatihan HAM	40	40	40	40	40		
			Jumlah pelatihan HAM	10	10	10	10	10		
			Jumlah K/L atau daerah yg telah melaksanakan RAN HAM	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota		
			Jumlah penyuluh HAM	136	136	136	136	136		

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
c	Kegiatan Diseminasi HAM	Meningkatnya Ke-menterian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM	Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota	34 kab/kota	8.0	Kemenkumham
			Jumlah data HAM yg diolah dari K/L, Prov, Kab & Kota	156	156	156	156	226		
			Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM	156	156	156	156	226		
d	Kegiatan Informasi HAM	Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM	Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet	156	156	156	156	226	7.0	Kemenkumham
			Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik	156	156	156	156	226		
e	Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Umum Tingkat Pertama	Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Jumlah pembangunan atau perbaikan fungsi operasionalisasi Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat	33.960 pkr	34.639 pkr	34.986 pkr	35.335 pkr	35.865 pkr	174.7	MA-RI
f	Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama	Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Penyediaan dana prodeo di pengadilan Tingkat Pertama	372 satker	388 satker	388 satker	388 satker	388 satker	102.7	MA-RI
			Mengoptimisasikan fungsi pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat							
g	Kegiatan Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN	Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN	Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat	23 satker	23 satker	23 satker	23 satker	23 satker	26	MA-RI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
h	Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.	Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	10 pkr	5 pkr	5 pkr	5 pkr	5 pkr	0,79	Kejaksaan Agung
i	Peningkatan Penuntutan pelanggaran HAM yang Berat	Meningkatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel	Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap penuntutan.	5 pkr	5 pkr	5 pkr	5 pkr	5	0,54	Kejaksaan Agung
Pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan										
a	Penyusunan Rencana induk, master plan dan road map revitalisasi industri pertahanan	Tersusunnya rencana pengembangan & pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri 2010 – 2014	Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan	50%	50%	-	-	-	-	Kemenhan/TNI POLRI
b	Konsolidasi RPJMN 2010-2014 beserta RKP, Penguatan basis pendanaan, dan Perumusan Kerangka Pendanaan 5 thn	Tersusunnya mekanisme pendanaan Industri Pertahanan dalam negeri yang bersifat multiyears	Rumusan pendanaan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang bersifat multiyears	100%	-	-	-	-	-	Kemenhan/TNI POLRI
c	Revisi Keppres 80 Tahun 2003 untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan	Tersedianya payung hukum untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan	Ditetapkannya Keppres Pengadaan barang dan jasa	100%	-	-	-	-	-	LKPP Kemenhan/TNI POLRI
d	Identifikasi teknologi – Alutsista TNI dan Alut POLRI yang dibutuhkan dalam PJP I	Tersedianya data kemampuan produksi alutsista TNI dan Alut Polri oleh Industri Pertahanan dalam Negeri	Jumlah item produk alutsista TNI dan Alut Polri yang mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam Negeri	25%	25 %	50%	-	-	-	Bappenas Kemenhan/TNI POLRI
e	Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sbg <i>Clearing House</i>	Tersedianya badan <i>Clearing House</i> lintas bidang dan lintas K/L	Efisiensi dan Efektivitas pengadaan Alutsista TNI dan Alut POLRI	100%	-	-	-	-	-	Bappenas Kemenhan/TNI POLRI

No	SUBSTANSI INTI / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU (RP MILIAR)	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
f	Refocusing, intensifikasi dan kolaborasi R & D	Terwujudnya model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	Jumlah model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	30%	30 %	30%	30 %	30 %	-	Kemhan/TNI
g	Penelitian, dan pengembangan alat peralatan pertahanan	Terwujudnya model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	Jumlah model dan/ atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	30%	30%	30%	30%	30%	19.29	Kemhan
h	Produksi Alutsista Industri dalam negeri	Meningkatnya produksi Alutsista Industri darat dalam negeri	Jumlah produksi Alutsista Industri dalam negeri	20%	24%	25%	25%	25%	7100.00	Kemhan
i	Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi	Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi	3	3	2	3	2	22.77	LSN
j	Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri	Meningkatkan kemandirian alut Polri produksi dalam negeri	Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional.	20%	20%	25%	25%	25%	1,000.00	POLRI
k	Pembuatan Prototype	Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas	Jumlah Prototype yang dihasilkan	5	4	3	5	5	43.11	POLRI
l	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan	Termanfaatkannya teknologi pertahanan, keamanan dan keselamatan	Prototipe pesawat udara nir awak	1					10,02	BPPT
			Rekomendasi		1	1	1	1		
m	Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan	Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	25,00	KRT
			Jumlah kegiatan ber sama hasil koordinasi dan sinkronisasi	1	1	1	1	1		